

Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah dan Opini Audit terhadap Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Anastasia Yaniarwana Sarumaha, Wiwik Andriani*, Rasyidah Mustika, Zahara

Politeknik Negeri Padang, Padang

*Correspondence: wiwikandriani@pnp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit terhadap aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit secara simultan mampu mempengaruhi aksesibilitas IFR di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Secara parsial hanya opini audit yang tidak mempengaruhi aksesibilitas IFR.

Kata kunci: belanja daerah, internet financial reporting, opini audit; pendapatan perkapita, pemerintah daerah.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of per capita income, regional expenditure, and audit opinions on internet financial reporting (IFR) accessibility in Regency and City Governments in South Sumatra, which consists of 17 governments. This research uses a saturated sampling method with a quantitative approach. The research results show that per capita income, regional expenditure, and audit opinion can simultaneously influence IFR accessibility in Regency and City Governments in South Sumatra. Partially, only audit opinions do not affect IFR accessibility.

Keywords: regional spending, internet financial reporting, audit opinion; per capita income, local government.

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, internet adalah media yang sangat umum. Jumlah pengguna internet meningkat dengan cepat karena keunggulan internet dibandingkan media lainnya. We Are Social melaporkan bahwa pada Januari 2023, jumlah pengguna internet telah mencapai 5,16 miliar, meningkat 1,9% dari bulan Januari tahun sebelumnya. Di Indonesia, pengguna internet mampu mencapai 212,9 juta pada tahun 2023 di bulan Januari, mewakili 77% dari populasi negara dan menandai peningkatan 2,85% dibandingkan dengan Januari 2022. Internet merupakan sarana yang paling efektif untuk mendistribusikan berbagai informasi, termasuk di sektor pemerintahan (We Are Social, 2023).

Dengan adanya informasi tersebut, memberikan gambaran dan manfaat bagi para penggunanya. Dalam pemerintahan, masyarakat juga wajib mengetahui informasi mengenai kegiatan yang ada di pemerintahan. Informasi harus diberikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai entitas publik, pemerintah wajib memberikan informasi kepada publik, termasuk laporan keuangan. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi berbagai informasi publik, transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan menjadi sangat penting. Penegasan ini searah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur suatu laporan keuangan pemerintah mudah diakses oleh semua pihak, baik dari segi prosedur maupun pemahamannya. Dengan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti, pemerintah daerah dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Cara yang mudah untuk menginformasikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara daring. Menurut Sukmadilaga (2019) *internet financial reporting* (IFR) adalah metode dimana informasi keuangan dapat disebarluaskan

secara umum melalui Internet. Dalam kerangka teori keagenan, pemerintah daerah berperan sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang merupakan prinsipal. Ketidakeimbangan informasi antara agen dan prinsipal menimbulkan peluang bagi agen untuk melakukan perilaku oportunistik, yaitu dengan mengutamakan kepentingannya sendiri (Rahmawati, 2017).

Namun, jika melihat keadaan saat ini, banyak pemerintah daerah yang belum berpartisipasi dalam pengungkapan laporan keuangan, sehingga mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan informasi mengalami kesulitan untuk mengakses atau memantau informasi keuangan pemerintah daerah tersebut. Sejumlah penelitian mengenai faktor-faktor pemerintah daerah untuk menerapkan *internet financial reporting* (IFR) telah banyak dilakukan. Penelitian Kurniati & Siddi (2020) menemukan bahwa kekayaan daerah, kompleksitas, tipe pemerintah daerah serta kualitas audit dapat mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Penelitian Putri & Setiawan (2022) menemukan bahwa IFR tidak dapat dipengaruhi oleh kekayaan daerah, tetapi dapat dipengaruhi oleh belanja daerah.

Faktor yang mampu mempengaruhi pelaporan keuangan secara daring adalah pendapatan perkapita adalah pendapatan mencakup sumber daya keuangan yang mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Efektivitas pemerintah ditunjukkan melalui besarnya pendapatan dan pengelolaan keuangan yang efisien. Belanja daerah merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Sesuai dalam PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran menyebutkan dalam paragraf 7 bahwa berbagai pengeluaran baik dari kas umum maupun dari kas daerah mencakup semua pengeluaran pada periode anggaran yang bersangkutan yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak dapat dikembalikan oleh pemerintah. Belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yang berarti peningkatan belanja pemerintah harus berujung pada peningkatan layanan bagi masyarakat.

Akibatnya, akan terjadi peningkatan keinginan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Opini audit juga dapat mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Jika opini audit yang diterima semakin baik, mampu memudahkan pengguna menemukan serta mengakses laporan keuangan di situs web pemerintah daerah akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila opini audit yang diberikan tidak wajar tanpa pengecualian, maka kemudahan bagi pengguna untuk menemukan dan melihat laporan keuangan akan menjadi lebih sulit (Kurniawan & Scorpianti, 2019). Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena belum adanya penelitian yang mengeksplorasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah tersebut dengan tujuan untuk menguji dan menentukan dampak pendapatan perkapita, belanja daerah serta opini audit pada pelaporan keuangan secara daring.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori keagenan, yang diperkenalkan Barle & Means (1932) yang mengemukakan bahwa perbedaan antara kontrol dan kepemilikan dapat menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi. Penemuan ini memicu penelitian Jensen & Meckling (1976) yang mengemukakan seiring berkembangnya sebuah sektor, sektor tersebut memerlukan bantuan dari pihak eksternal untuk pengelolaannya. Teori keagenan diuraikan sebagai perjanjian yang melibatkan satu atau beberapa individu (prinsipal) mengamanatkan individu lain (agen) dan memberikan kuasa untuk pengambilan keputusan kepada agen atas nama prinsipal (Rahmawati, 2017). Hubungan keagenan juga muncul dalam organisasi sektor publik (Andriani et al., 2023). Dalam hal ini, masyarakat bertindak sebagai prinsipal, sedangkan pejabat publik berfungsi sebagai agen (Yentifa et al., 2023). Pejabat publik mengelola kegiatan pelayanan publik dengan mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mensejahterakannya dan pemerintah berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban (Aprila et al., 2023).

Pendapatan perkapita

Pendapatan mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah dan mengindikasikan seberapa efektif pemerintah daerah mengelola sumber daya mereka. Pendapatan ini terutama bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), yang mencakup seluruh pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan

perekonomian di dalam wilayah tersebut. Komponen-komponen pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber PAD lainnya yang sah.

Belanja Daerah

Menurut Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuatu dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota disebut sebagai belanja daerah. Belanja ini meliputi berbagai hal yang bersifat wajib dan pilihan, termasuk urusan yang ditangani oleh divisi tertentu atau bidang yang dikelola secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, atau antara beberapa pemerintah, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (Venni et al., 2023).

Opini Audit

Sesuai dengan ketentuan umum UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan, butir 11 Pasal 1 mendefinisikan opini sebagai penilaian profesional yang menilai keakuratan informasi-informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sukmadilaga (2019) menjelaskan pelaporan keuangan melalui internet merupakan metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membagikan informasi keuangan kepada publik secara daring. Dalam literatur akuntansi, praktik ini disebut sebagai pengungkapan sukarela. Istilah “pengungkapan sukarela” digunakan bukan karena sifat informasi yang dibagikan, tetapi karena cara yang digunakan untuk membuat informasi tersebut tersedia. Menurut Winangsih & Fathah (2023), *internet financial reporting* merupakan cara pemerintah daerah menginformasikan kondisi keuangannya secara daring, khususnya melalui website. Pelaporan keuangan yang dilakukan melalui internet memungkinkan pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangan, laporan anggaran, dan informasi keuangan lainnya dengan mudah dan transparan kepada masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting

Pendapatan perkapita mendukung kegiatan pemerintah daerah, dan keberhasilannya tercermin dari tingkat pendapatan dan pengelolaan keuangan yang baik. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar kewajiban pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan sumber daya (Andriani, 2023). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah sebagai agen harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal, yang memiliki hak memperoleh informasi tentang pengelolaan sumber daya (Hadianto & Murtin, 2020). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola berbagai sumber daya yang diperoleh dari pajak ataupun retribusi yang diberikan oleh masyarakat yang merupakan prinsipal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya tersebut, karena masyarakat berhak untuk mengakses informasi tersebut. Penelitian Masra & Sari (2020) mengungkapkan bahwa pendapatan perkapita yang lebih besar berpotensi mendorong pengungkapan keuangan yang lebih secara daring.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting

Pengeluaran pemerintah yang mengurangi jumlah kekayaan bersih daerah disebut sebagai belanja daerah. Semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota didanai melalui belanja daerah (Putri & Setiawan, 2022). Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah, pengeluaran daerah memainkan peran yang sangat krusial. Belanja ini dapat bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam teori keagenan, pemerintah yang bertindak sebagai agen bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat sebagai prinsipal untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah, memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatutan penggunaan dana tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan dana publik. Penelitian Masra & Sari (2020) menunjukkan suatu belanja daerah di Sumatera Barat

mampu mempengaruhi IFR, yang mungkin disebabkan karena belanja daerah yang tinggi mengindikasikan tingkat kualitas layanan yang baik. Hasil ini juga sama dengan penelitian Firly *et al.* (2019) dan Putri & Setiawan (2022) yang juga menemukan secara signifikan belanja daerah dapat mempengaruhi IFR.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting

Opini audit adalah ukuran kualitas laporan keuangan yang mencerminkan pendapat atas kewajaran laporan tersebut. Jenis opini audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah, auditor independen memberikan opini yang menilai kualitas, keandalan, dan kecukupan informasi dalam laporan tersebut. Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen yang mengelola keuangan publik atas nama masyarakat sebagai prinsipal dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Opini audit yang positif menandakan bahwa laporan keuangan telah ditelaah dengan cermat, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sebagai agen. Pengungkapan laporan keuangan yang tepat sangat penting untuk transparansi, membantu masyarakat memahami manajemen keuangan publik. Penelitian Kurniawan *et al* (2019) menunjukkan bahwa opini audit memiliki potensi untuk mempengaruhi keteraksesan laporan keuangan berbasis internet oleh pemerintah daerah, dengan opini audit yang wajar dapat memudahkan pengguna untuk mencari dan mengakses laporan keuangan di website pemerintah. Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian Moehardiono & Yuliati (2021), Rahayu & Khasanah (2022), dan Winangsih & Fathah (2023), yang mengindikasikan bahwa opini audit dapat mempengaruhi pelaporan keuangan berbasis internet di pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah, dan Opini Audit Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting

Ada beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam memudahkan aksesibilitas suatu laporan keuangan melalui internet diantaranya adalah pendapatan perkapita, belanja daerah dan opini audit. Teori keagenan digunakan dalam penelitian internet financial reporting. Teori ini berfokus pada hubungan antara pihak yang memiliki kepentingan (principal) dengan pihak yang dipekerjakan (agent) dalam mengelola sumber daya. Dalam konteks keuangan daerah, teori keagenan mempengaruhi bagaimana pendapatan perkapita dan pengeluaran daerah digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Opini audit, sebagai bagian dari proses audit, untuk membuktikan bahwa laporan keuangan daerah disajikan dengan akurat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana pendapatan dan belanja daerah digunakan.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif untuk menilai bagaimana variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Menilai pengaruh variabel-variabel tersebut, digunakan analisis regresi berganda. Data sekunder untuk penelitian ini bersumber dari situs web resmi pemerintah daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sumsel serta data demografi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 pemerintahan dan menggunakan metode sampling jenuh. Metode ini melibatkan penggunaan seluruh populasi sebagai sampel untuk mencapai generalisasi dengan kesalahan yang minimal (Sugiyono, 2017).

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	0,221	0,171	0,23774

Sumber: data olahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,171 atau 17,1%. Ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit menyumbang 17,1% dalam menjelaskan *internet financial reporting*, sedangkan 82,9% sisanya dipengaruhi aspek-aspek lain yang tidak diuraikan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Hipotesis
Pendapatan Perkapita	-2.786	2,011	.008	Terima
Belanja Daerah	3.407	2,011	.001	Terima
Opini Audit	.539	2,011	.593	Tolak

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: pengaruh variabel pendapatan perkapita terhadap aksesibilitas *internet financial reporting*. Hasil uji-t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,008, yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien sebesar -2,786. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh variabel pendapatan perkapita terhadap aksesibilitas *internet financial reporting*. Artinya daerah dengan pendapatan kekayaan yang tinggi cenderung menurunkan tingkat keteraksesan *Internet Financial Reporting* (IFR). Sebaliknya, daerah dengan pendapatan rendah cenderung lebih tinggi aksesibilitas IFR. Penelitian ini mengungkapkan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi menunjukkan kinerja positif dalam memaksimalkan potensi daerahnya, yang dapat menjadi indikator prestasi. Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah sebagai agen harus bertindak demi kepentingan masyarakat dengan menyediakan informasi keuangan yang transparan. Adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal, dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Untuk mengurangi asimetri ini, pemerintah daerah berupaya menyediakan akses mudah terhadap informasi keuangan melalui website resmi. Keteraksesan informasi ini memerlukan dukungan teknologi jaringan dan tenaga ahli, yang penting untuk memastikan kemudahan akses dan transparansi. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, upaya pemerintah dalam menyediakan akses informasi keuangan tidak akan maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masra & Sari (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Hadianto & Murtin (2020) yang berasumsi bahwa pemerintah berpendapatan tinggi lebih bersedia mengakses laporan keuangan tidak sepenuhnya benar. Faktanya, peningkatan pendapatan pemerintah merupakan fenomena perekonomian yang tidak lepas dari kondisi fiskal pemerintah daerah.

Pengaruh belanja daerah terhadap aksesibilitas *internet financial reporting*. Hasil uji-t menunjukkan taraf signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05; hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh variabel belanja daerah terhadap aksesibilitas *internet financial reporting*. Teori keagenan menyatakan hubungan antara prinsipal atau masyarakat dan pemerintah yang disebut agen yang bertujuan untuk meminimalkan asimetri informasi. Ketika belanja daerah meningkat, pemerintah daerah lebih termotivasi untuk mengungkapkan *Internet Financial Reporting* (IFR) untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah dengan pengeluaran yang besar ingin membuktikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien, membangun kepercayaan publik, dan menunjukkan pengelolaan dana publik yang baik. IFR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran sehingga masyarakat dapat menilai dampak belanja daerah terhadap kesejahteraan. Alokasi pengeluaran untuk infrastruktur teknologi informasi juga meningkatkan kualitas IFR, menyediakan data keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Masra & Sari (2020); Putri & Setiawan (2022) yang menemukan bahwa belanja daerah secara signifikan memengaruhi IFR. Belanja daerah yang lebih tinggi menghasilkan penyampaian laporan keuangan yang lebih komprehensif melalui situs web pemerintah daerah.

Pengaruh opini audit terhadap aksesibilitas *internet financial reporting*. Hasil uji-t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.593 lebih besar dari 0.05; hal ini mengindikasikan bahwa opini audit tidak berpengaruh pada aksesibilitas *internet financial reporting*. Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana opini audit mempengaruhi pelaporan keuangan berbasis

internet. Teori ini mengeksplorasi dinamika antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah), dengan fokus pada bagaimana konflik kepentingan antara pihak-pihak tersebut dapat dikelola dan diselesaikan. Opini audit dari auditor independen memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, yang membantu mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Ketika opini audit mengindikasikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan prinsip-prinsip teori keagenan, karena pemerintah daerah, terlepas dari opini audit mereka, tetap mengungkapkan status keuangan mereka secara online. Kurangnya diferensiasi ini mengakibatkan tidak adanya hubungan yang teramati antara opini audit dan pelaporan keuangan melalui internet. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Hadianto & Murtin (2020); Winangsih & Fathah (2023) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Hal ini mengindikasikan bahwa opini audit wajar tanpa pengecualian tidak memotivasi pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangannya secara online.

Tabel 3
Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.752	3	.251	4.435	.008 ^b
	Residual	2.656	47	.057		
	Total	3.408	50			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 3 hasil dari uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit adalah sebesar 0,008. Hal ini didukung oleh fakta bahwa nilai F-hitung sebesar 4,435 melebihi nilai F-tabel sebesar 2,80; hal ini mengindikasikan secara bersaa-sama suatu pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit dapat berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan melalui internet. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit secara bersama-sama memengaruhi keteraksesan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota melalui internet, yang dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan mengeksplorasi dinamika antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah), dengan fokus pada bagaimana konflik kepentingan antara kedua belah pihak ditangani. Pendapatan perkapita memberikan pemerintah daerah akses ke teknologi informasi yang lebih canggih, sehingga mengurangi asimetri informasi. Pengeluaran daerah mencerminkan komitmen terhadap alokasi anggaran untuk teknologi informasi dan transparansi, yang menunjukkan upaya agen untuk meningkatkan akuntabilitas kepada prinsipal melalui informasi yang tepat dan terbaru. Opini audit memberikan penilaian independen atas kewajaran suatu laporan keuangan, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong transparansi melalui IFR. Pendapatan perkapita, belanja daerah, serta opini audit mampu secara bersama-sama membentuk mekanisme yang dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip teori keagenan, sehingga mendorong penerapan IFR dan meningkatkan transparansi keuangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap aksesibilitas pelaporan keuangan melalui internet pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2022. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kemakmuran yang rendah mungkin akan lebih aktif dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam rangka menarik investor atau bantuan dari pemerintah pusat atau luar. Belanja daerah secara signifikan mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bertujuan untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaporan keuangan melalui internet. Hal ini digunakan untuk menggambarkan pengaruh langsung belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan kualitas dan transparansi

pelaporan keuangan secara online. Opini audit tidak mempengaruhi aksesibilitas pelaporan keuangan melalui internet. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit, baik wajar tanpa pengecualian maupun opini yang berbeda, tidak dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan keuangan secara online. Secara simultan, pendapatan perkapita, belanja daerah, dan opini audit memiliki pengaruh yang signifikan aksesibilitas laporan keuangan melalui internet. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan per kapita dan belanja daerah yang signifikan perlu memastikan laporan keuangan disajikan secara online melalui *internet financial reporting* untuk menunjukkan komitmen keterbukaan. Opini audit yang positif dapat memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan, memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan akurat dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2023). Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 4(3), 951–959.
- Andriani, W., Ananto, R. P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The Influence of Financial Literacy and Educational Background on the Financial Governance of Nagari Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 742–754.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.
- Berle, A. and Means, G. 1932 *The Modern Corporation and Private Property*. Commerce Clearing House, New York.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, 2023. *Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023*, diakses melalui website <https://sumsel.bps.go.id/indicator/153/738/1/jumlah-pulau.html>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, 2023, *Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Selatan*, diakses melalui website <https://sumsel.bpk.go.id/lhp-lkpd-provinsi-sumatera-selatan/>
- Firly, A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(7).
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 33-45.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1-13.
- Kurniawan, C. H., & Scorpiani, L. N. K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Modus*, 31(2), 184-206.
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor yang mempengaruhi internet financial reporting (ifr) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757-2771.
- Moehardiono, I. A., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 717-727.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 438-448.
- Rahayu, S., & Khasanah, F. W. N., (2022), Internet Financial Reporting: In the case of district and city governments in Central Java Province, Indonesia. *City*, 6(3), 3.
- Rahmawati. (2017). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sukmadilaga, C. 2019. *Internet Financial Reporting*. Bandung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1134-1144.
- We Are Social. 2023. The Changing World of Digital In 2023, diakses melalui website <https://wearesocial.com/us/blog/2023/01/digital-2023/>
- Winangsih, A. W. A., & Fathah, R. N. 2023. Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada *Website* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299-3309.
- Yentifa, A., Andriani, W., Jr, S. R., Aprila, D., & Sofia, G. 2023. Village Fund Accounting Model in Realizing Nagari Financial Accountability. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 716–729.